

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

Pada bab ini disajikan tinjauan pustaka yang akan melandasi kerangka pemikiran dan hipotesis. Tinjauan pustaka digunakan sebagai gambaran konsep dasar mengenai variabel-variabel yang akan diteliti dan dilandasi dengan adanya penelitian terdahulu. Kemudian pada bab ini, penulis juga akan membahas mengenai kerangka pemikiran yang membahas tentang hubungan antar variabel dependen dan variabel independen. Kemudian diiringi dengan hipotesis yang diajukan.

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pembangunan ekonomi di suatu negara tidak terlepas dari pertumbuhan ekonomi. Karena pembangunan ekonomi pada saat ini merupakan salah satu syarat mutlak apabila suatu wilayah ingin mengalami pertumbuhan ekonomi. Suatu wilayah dikatakan sejahtera apabila dari segi pertumbuhannya mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan wilayah lain. Beberapa faktor yang diperkirakan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia mencakup tiga faktor besar, yaitu sumber daya, keterbukaan daerah dan kebijakan. Faktor sumber daya mencakup sumber daya alam, keuangan daerah dan sumber daya manusia, sedangkan faktor kebijakan terdiri dari upah dan desentralisasi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi di daerah biasanya akan diikuti dengan terjadinya pemerataan pendapatan pada masyarakatnya.

2.1.1.1 Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Simon Kuznets guru besar ilmu ekonomi di Universitas Harvard (1960-1971) menyatakan pertumbuhan ekonomi sebagai keadaan dimana suatu negara mampu meningkatkan hasil produksinya berdasarkan kemajuan teknologi yang diiringi juga dengan penyesuaian ideologi yang dimiliki. Gustiana (2014) juga berpendapat yang sama pada karya tulis ilmiahnya bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan di daerah. Ada beberapa indikator keberhasilan pembangunan di suatu daerah, diantaranya perubahan struktur perekonomian, meningkatnya kualitas manusia, pertumbuhan ekonomi dan lain sebagainya. Pertumbuhan ekonomi di suatu daerah biasanya dilihat dengan meningkatnya produksi barang dan jasa dari suatu daerah yang diukur dengan produk domestik regional bruto (Sholihah et al., 2017).

Menurut Boediono (dalam Tarigan, 2005) pertumbuhan ekonomi merupakan output perkapita dalam jangka panjang, yang dapat diartikan bahwa presentase pertambahan *output* tersebut harusnya lebih besar dari pada presentase jumlah penduduk. Sedangkan menurut Sukirno (2011: 29) pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan ekonomi yang berlaku dari waktu ke waktu dan menyebabkan pendapatan nasional riil semakin berkembang. Subandi (2011: 15) juga mengartikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan GDP/GNP tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari pertumbuhan penduduk, atau apakah terjadi perubahan struktural ekonomi atau tidak. (Sholihah et al., 2017)

2.1.1.2 Model Pertumbuhan Ekonomi Regional

a. Model Basis Ekspor (*Export-Base Model*)

Douglas C. North merupakan orang yang pertama kali mengenalkan model ini berdasarkan hasil studinya di berbagai negara bagian Amerika Serikat pada 1955. Model ini mengatakan bahwa potensi dari suatu wilayah dapat mendukung percepatan kegiatan ekonomi daerah terkhususnya pada kegiatan ekspor. Jika suatu wilayah memiliki kegiatan ekspor, bisa dipastikan bahwa wilayah tersebut akan menumbuhkan kegiatan ekonomi wilayah dengan cepat akibat adanya dampak berganda (*multiple effect*) yang besar.

Menurut Blair (1991, dikutip dalam Sjafrizal, 2018), model ekspor ini disebut dengan *formal income model* yang memiliki persamaan model PDRB sebagai berikut:

$$Y = C + M_i - M_o \quad (2.1)$$

Dengan keterangan Y merupakan PDRB dengan harga konstan, C merupakan konsumsi, M_i merupakan pendapatan akibat kegiatan ekspor, dan M_o merupakan pengeluaran akibat kegiatan impor.

b. Model *Interregional Income*

Model ini yaitu perluasan dari model basis ekspor yang dikembangkan oleh Richardson (1978, dikutip dalam Sjafrizal, 2018). Richardson menyatakan bahwa model ini memasukkan faktor ekspor dan perdagangan antar daerah dengan asumsi bahwa perkembangan kegiatan ekonomi daerah lain dapat mempengaruhi kegiatan perekonomian daerah tersebut.

Kegiatan perdagangan antar daerah tersebut dibagi menjadi barang konsumsi dan barang modal (investasi). Agar analisis lebih kompleks, harus ada suatu faktor tambahan yang perlu dimasukkan dalam model ini yaitu unsur pemerintah daerah dalam bentuk penerimaan (*government revenue*), baik dalam bentuk pajak daerah dan dana perimbangan, dan bentuk pengeluaran berupa konsumsi dan investasi pemerintah daerah. Selain itu, unsur mobilitas investasi antar daerah juga turut diperhitungkan sesuai dalam prinsip teori ekonomi Keynes sehingga akan menghasilkan model pertumbuhan ekonomi antar daerah sederhana sebagai berikut:

$$Y_i = C_i + I_i + G_i + (X_i - M_i) \quad i = 1, 2, 3, \dots, n \quad (2.2)$$

Dimana Y_i , C_i , I_i , G_i , X_i , dan M_i masing-masing yaitu PDRB, konsumsi, investasi, pengeluaran, ekspor, dan impor dan kemudian untuk i menunjukkan daerah. Persamaan ini mempunyai implikasi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi regional dengan dilihat pada peningkatan pendapatan regional untuk periode tertentu. Selain itu, pertumbuhan ekonomi suatu regional juga akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi regional lainnya yang terkait. Oleh karena itu, pengaruhnya akan lebih besar pada daerah-daerah yang lokasinya berdekatan satu sama lainnya.

c. Model Neo-Klasik Spasial

Bort (1960, dikutip dalam Sjafrizal, 2018), orang yang mengembangkan model Neo-Klasik dengan berpedoman pada teori pertumbuhan Sollow (1957) menyatakan bahwa model ini berfokus pada kegiatan produksi dengan adanya penambahan faktor mobilitas tenaga kerja dan mobilitas modal antar daerah.

Penambahan faktor tersebut digunakan untuk melihat kemampuan regional dalam mempengaruhi pertumbuhan suatu wilayah.

Hal ini terjadi dikarenakan wilayah satu dengan wilayah lainnya terdapat perbedaan dalam karakteristiknya terkhusus pada perbedaan upah dan pendapatan antar daerah. Sehingga bisa disimpulkan model ini menjelaskan bahwa peningkatan kegiatan produksi berbanding lurus dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi regional. Model Neo-Klasik yang dikembangkan oleh Cobb Douglass merupakan *grand theory* dalam penelitian ini dan memiliki persamaan fungsi produksi, sebagai berikut:

$$Y = f(K, L) \quad (2.3)$$

Dengan Y merupakan PDRB, K merupakan modal dan L merupakan tenaga kerja. Dalam model ini tahap pengembangan proses pembangunan dianggap kurang efektif dikarenakan adanya ketimpangan pembangunan regional yang disebabkan oleh kurang meratanya modal dan tenaga kerja. Jika hal tersebut tidak segera ditangani, maka dapat menyebabkan divergensi. Divergensi yaitu suatu kondisi pertumbuhan ekonomi akan cenderung meningkatkan ketimpangan ekonomi antar daerah. Namun, jika proses suatu pembangunan semakin baik, maka modal dan tenaga kerja secara otomatis akan berjalan secara bertahap ke daerah pinggiran kemudian menyebabkan pertumbuhan ekonomi pada daerah kurang berkembang menjadi berkembang. Proses ini dinamakan konvergensi, yang merupakan kondisi ketika ketimpangan pembangunan antar regional berkurang dengan adanya pertumbuhan ekonomi.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa peningkatan pendapatan, tenaga kerja, dan faktor diluar seperti teknologi dan investasi memiliki hubungan yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Kemudian, pada awal proses pembangunan akan menyebabkan ketimpangan regional meningkat, tetapi setelah mencapai titik maksimum bila pembangunan terus dilanjutkan maka ketimpangan akan berkurang.

d. Model Penyebab Berkumulatif

Model ini dipopulerkan oleh Nicolas Kaldor sebagai kritik terhadap model Neo-Klasik. Menurut Nicolas Kaldor, pemerataan pembangunan antar daerah tidak dapat dicapai hanya melalui mekanisme pasar tetapi melalui program pemerintah. Jika terus-menerus diserahkan melalui mekanisme pasar, dikhawatirkan akan menyebabkan suatu ketimpangan ekonomi antar daerah akan semakin meluas seiring dengan peningkatan proses pembangunan ekonomi nasional. Richardson (1978, dikutip dalam Sjafrizal, 2018) memformulasikan model ini secara sederhana , sebagai berikut:

$$r = \alpha + \beta y \quad (2.4)$$

Dengan r merupakan peningkatan produktifitas dan y merupakan peningkatan PDRB, sedangkan $\alpha + \beta$ merupakan konstanta. Persamaan ini menunjukkan bahwa peningkatan produktivitas terjadi dikarenakan adanya kegiatan perekonomian yang meningkat pada suatu daerah dan bila terjadi penurunan tingkat produktivitas. Hubungan ini terjadi karena dilandasi oleh adanya keuntungan aglomerasi dan *increasing return to scale* yang akan semakin besar bila terjadi peningkatan kegiatan produksi di daerah. Di sini koefisien β

dinamakan sebagai *verdoorn coefficient* sesuai dengan nama ahli yang mula-mula membawa persamaan ini.

e. Model Kota dan Desa

Mirdal (1956, dikutip dalam Sjafrizal, 2018), berpendapat bahwa perkembangan pertumbuhan ekonomi regional dipengaruhi oleh faktor dari kegiatan ekonomi pedesaan (*rural*) dan dengan kegiatan ekonomi perkotaan (*urban*). Hal ini disebabkan adanya keterkaitan antara daerah pedesaan dengan perkotaan terkait dengan kegiatan ekonomi. Di desa, kegiatan ekonomi lebih cenderung pada kegiatan pertanian, sedangkan di kota kegiatan ekonomi lebih mengarah pada kegiatan di sektor industri, perdagangan, dan jasa. Keterkaitan ini muncul dikarenakan sektor industri dan sektor perdagangan memiliki bahan baku bersumber dari sektor pertanian.

Keterkaitan antara daerah perkotaan dengan pedesaan secara sederhana dapat dilakukan menggunakan teknik korelasi atau regresi antara nilai PDRB daerah perkotaan dengan daerah kabupaten sebagai penghubung daerah pedesaan. Dengan adanya keterkaitan ini, PDRB dapat meningkat melalui kegiatan perekonomian yang optimal sehingga meningkatkan daya saing produk. Hal ini merupakan salah satu pendukung yang kuat dalam proses pembangunan daerah. Dilain pihak keterkaitan ekonomi antara daerah pedesaan dan perkotaan tersebut dapat mendorong terwujudnya efek rembesan (*trickling-down effect*) (Sjafrizal, 2018). Dengan adanya proses tersebut, pemerataan pembangunan antara daerah pedesaan dan perkotaan bisa diperbaiki sehingga kemakmuran masyarakat secara keseluruhan bisa ditingkatkan.

2.1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pengertian produk domestik regional bruto menurut Badan Pusat Statistik (BPS) didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Produk domestik regional bruto (PDRB) adalah salah satu indikator penting untuk mengetahui perkembangan perekonomian di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.

Pada PDRB atas dasar harga berlaku jumlah akhir nilai barang dan jasa pada PDRB harus sama dengan jumlah akhir nilai barang dan jasa yang diperoleh dari hasil produksi, yang menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada periode saat ini, sedangkan pada PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan bahwa nilai tambah barang dan jasa menggunakan harga berlaku pada satu tahun untung dijadikan tahun dasar. Perhitungan produk domestik regional bruto secara konseptual menggunakan tiga macam pendekatan, yaitu:

a. Pendekatan Produksi

Pada pendekatan produksi menjelaskan bahwa PDRB yaitu jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh beberapa unit produksi pada suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Terdapat 17 sektor produksi yang ada dalam dalam unit pendekatan produksi yaitu: pertanian, kehutanan dan perikanan, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, pengadaan listrik, pengadaan air, pengolahan limbah sampah dan daur ulang, konstruksi, perdagangan besar dan

eceran serta reparasi mobil dan sepeda motor, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, *real estate*, jasa perusahaan, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan lainnya dan jasa lainnya. Rumus yang digunakan pada pendekatan produksi sebagai berikut:

$$Y = (P_1 \times Q_1) + (P_2 \times Q_2) + \dots + (P_n \times Q_n) \quad (2.5)$$

Keterangan:

Y = Pendapatan nasional

P = Harga barang

Q = Jumlah barang

b. Pendekatan Pengeluaran

Pada pendekatan pengeluaran menjelaskan bahwa PDRB yaitu seluruh komponen permintaan akhir yang berasal dari: pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi lembaga non profit yang melayani rumah tangga, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan inventori & diskrepansi statistik, ekspor barang dan jasa, dan impor barang dan jasa. Rumus yang digunakan pada pendekatan pengeluaran sebagai berikut:

$$Y = C + I + G + (Ex - Im) \quad (2.6)$$

Keterangan:

Y = Pendapatan nasional

C = Konsumsi rumah tangga

I = Investasi

G = Pengeluaran pemerintah

Ex = Ekspor

Im = Impor

c. Pendekatan Pendapatan

Pada pendekatan pendapatan menjelaskan bahwa PDRB yaitu jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang terdapat pada proses produksi pada wilayah tertentu dan dalam waktu tertentu. Balas jasa yang dimaksud merupakan upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan yang dihitung sebelum adanya pemotongan pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak tidak langsung dikurangi subsidi). Rumus yang digunakan pada pendekatan pendapatan sebagai berikut:

$$Y = R + W + I + P \quad (2.7)$$

Keterangan:

Y = Pendapatan nasional

R = Sewa

W = Gaji/Upah

I = Bunga

P = Laba

2.1.3 Aglomerasi

Indonesia merupakan negara kepulauan oleh sebab itu pertumbuhan ekonomi di setiap wilayah di Indonesia tidak sama. Ini sesuai dengan konsep Perroux tentang aglomerasi yang menyatakan bahwa pertumbuhan tidak terjadi

pada semua tempat, tetapi hanya sebagian tempat saja. Biasanya terdapat fenomena antara daerah yang mempunyai pertumbuhan ekonomi tinggi dengan daerah yang mempunyai pertumbuhan ekonomi rendah sehingga akan berdampak pada munculnya aglomerasi. Aglomerasi dapat diartikan sebagai kegiatan ekonomi yang terpusat pada wilayah-wilayah tertentu yang dapat menyebabkan terjadinya perbedaan antar wilayah.

2.1.3.1 Pengertian dan Konsep Aglomerasi

Menurut Kuncoro (2012: 26) aglomerasi adalah konsentrasi spasial dari aktifitas ekonomi di kawasan perkotaan karena penghematan akibat dari perusahaan yang letaknya saling berdekatan dan akibat dari kalkulasi perusahaan secara individual. Kemudian Marshall yang merupakan salah satu pencetus dari istilah aglomerasi yang disebut sebagai industri yang terlokalisir (*localized industries*). Salah satu manfaat yang dapat ditimbulkan oleh kegiatan aglomerasi yaitu penghematan skala (*scale economies*) (Rezkinosa, 2011).

Menurut Tarigan (2005: 159-160) aglomerasi berdasarkan penghematan skala (*economic of scale*) adalah keuntungan karena dapat memproduksi berdasarkan spesialisasi, sehingga produksi lebih besar dan biaya per unitnya lebih efisien. Biaya per unit dapat lebih murah baik dari mesin itu lebih efisien ataupun karena biaya tetap (*fixed cost*) tidak bertambah, walaupun jumlah produksi ditingkatkan (sampai batas tertentu maupun proporsi kenaikannya tidak sebesar kenaikan produksi). Lebih lanjut, dalam pengertian dari *New Economical Geographic* atau Teori Ekonomi Baru salah satu faktor utama penentu lokasi yang akan terjadi aglomerasi industri adalah adanya keadaan yang mana

terkonsentrasinya pasar tenaga kerja yang dapat dilihat dari jumlah penduduk yang masuk dalam usia kerja di suatu wilayah (Rezkinosa, 2011). Salah satu cara perhitungan aglomerasi industri yaitu dengan menggunakan indeks balassa yang merupakan suatu perhitungan rasio atau perbandingan dari jumlah tenaga kerja industri di suatu wilayah (kabupaten/kota di Jawa Barat) dengan total tenaga kerja industri di wilayah yang lebih besar (Provinsi Jawa Barat) (Sbergami dalam Sodik, 2002: 7). Penggunaan Indeks Balassa berdasarkan pada kekhususan untuk dapat memberikan faktor spesialisasi dimana dalam penelitian ini diwakilkan oleh jumlah atau besaran tenaga kerja. Hubungan Aglomerasi dengan Pertumbuhan Ekonomi. Berikut rumus untuk menghitung Indeks Balassa:

$$\frac{E_{ij}}{\sum E_{ij}} \bigg/ \frac{\sum j E_{ij}}{\sum i \sum j E_{ij}} \quad (2.8)$$

Keterangan:

E_{ij} : total tenaga kerja pada sektor industri tingkat kabupaten/kota

$\sum E_{ij}$: total tenaga kerja tingkat kabupaten/kota

$\sum j E_{ij}$: total tenaga kerja pada sektor industri provinsi

$\sum i \sum j E_{ij}$: total tenaga kerja di tingkat propinsi

2.1.3.2 Teori-Teori Aglomerasi

a. Teori Klasik

Teori Klasik tentang aglomerasi berpendapat bahwa aglomerasi muncul karena para pelaku ekonomi berupaya mendapatkan penghematan aglomerasi, baik disebabkan karena penghematan lokalisasi maupun penghematan urbanisasi, dengan mengambil lokasi yang saling berdekatan satu sama lain. Aglomerasi ini mencerminkan tentang adanya sistem interaksi antara pelaku ekonomi yang sama: apakah itu antar perusahaan dalam industri yang sama, antar perusahaan dalam industri yang berbeda, maupun antar individu, perusahaan dan rumah tangga.

Pendekatan lain yaitu mengkaitkan aglomerasi sebagai suatu bentuk spasial dengan konsep “penghematan aglomerasi” dengan melalui konsep eksternalitas. Para ekonom membedakan antara: (1) penghematan internal dan eksternal (*internal economies dan external economies*); (2) penghematan akibat skala ekonomis dan cakupan (*economies of scale dan economies of scope*) (Scott & Stopper dalam Kuncoro, 2012: 21). Penghematan internal yaitu suatu pengurangan biaya secara internal di dalam suatu perusahaan atau pabrik. Seberapa jauh pengurangan biaya yang dapat dicapai pada suatu perusahaan tergantung apakah efisiensi bisa ditingkatkan atau dipertahankan. Sedangkan penghematan eksternal yaitu pengurangan biaya yang terjadi akibat aktivitas yang berada di luar lingkup perusahaan atau pabrik. Sebagaimana halnya suatu perusahaan bisa mencapai penghematan biaya secara internal dengan cara memperluas produksi atau meningkatkan efisiensi, satu atau beberapa industri dapat meraih penghematan eksternal dengan beraglomerasi secara spasial.

Penghematan akibat adanya skala ekonomi muncul karena perusahaan menambah produksi dengan cara memperbesar pabrik (skala ekonomi). Penghematan biaya terjadi dengan menggunakan cara meningkatkan skala pabrik sehingga biaya produksi per unit dapat ditekan. Berbeda halnya dengan penghematan akibat cakupan yang disebabkan oleh sejumlah aktivitas atau unit usaha secara internal ataupun eksternal dapat dilakukan pada saat yang bersamaan sehingga menghemat biaya (Hasanah, 2016).

b. Teori Eksternalitas Dinamis

Teori Eksternalitas Dinamis memercayai bahwa kedekatan geografis memudahkan transmisi ide, oleh karena itu transfer teknologi merupakan hal penting bagi kota. Teori Eksternalitas Dinamis ini didasarkan pada teori yang dikemukakan oleh Marshall-Arrow-Romer (MAR), Porter dan Jacob. Teori-teori ini mencoba menjelaskan secara simultan bagaimana membentuk kota dan mengapa kota tumbuh (Didi Nuryadin & Jamzani Sodik, 2007: 4).

Eksternalitas MAR ditekankan pada transfer pengetahuan antar perusahaan dalam suatu industri. Menurut MAR monopoli lokal merupakan hal yang lebih baik dibandingkan dengan kompetisi lokal karena monopoli lokal akan menghambat aliran ide dari industri lain dan eksternalitas diinternalisasi oleh inovator.

Seperti dengan MAR, Porter juga mengatakan bahwa dengan adanya transfer pengetahuan tertentu, konsentrasi industri secara geografis akan mendorong pertumbuhan. Adapun perbedaan dengan MAR, Porter menyatakan bahwa kompetisi lokal lebih penting untuk mempercepat adaptasi inovasi.

Tidak seperti MAR dan Porter, Jacob mempercayai bahwa transfer pengetahuan paling penting yaitu yang berasal dari industri-industri inti. Variasi dan keberagaman industri yang berdekatan secara geografis akan mendukung inovasi serta pertumbuhan dibanding dengan spesialisasi secara geografis.

c. Teori Ekonomi Geografi Baru (*The New Economic Geography*)

Teori Ekonomi Geografi Baru berupaya untuk menurunkan efek-efek aglomerasi dari interaksi antara besarnya pasar, biaya transportasi serta *increasing return* dari suatu perusahaan. Faktor utama dalam terjadinya aglomerasi industri menurut teori ini yaitu dengan adanya keadaan dimana terkonsentrasinya pasar tenaga kerja yang dapat dilihat dari jumlah penduduk yang masuk dalam usia kerja di suatu wilayah.

Teori ekonomi geografi baru menekankan pada adanya mekanisme kausalitas sirkular untuk menjelaskan konsentrasi spasial dari kegiatan ekonomi (Krugman dan Venables dalam Sodik & Iskandar, 2007). Dalam model ini kekuatan sentripetal berasal dari adanya variasi konsumsi atau beragamnya *intermediate good* pada sisi produksi. Kekuatan sentrifugal asalnya dari tekanan yang dimiliki oleh konsentrasi geografis dari pasar input lokal yang menawarkan harga lebih tinggi dan akan menyebabkan permintaan. Oleh karena itu, jika biaya transportasi cukup rendah maka akan terjadi aglomerasi.

Dalam model eksternalitas teknologi, transfer pengetahuan antar perusahaan akan memberikan insentif bagi aglomerasi kegiatan ekonomi. Informasi diperlakukan sebagai barang publik dengan kata lain tidak akan ada persaingan dalam memperolehnya. Difusi informasi yang berbeda-beda, manfaat

interaksi dapat meningkat seiring dengan jumlah perusahaan. Dikarenakan interaksi ini bersifat informal, perluasan pertukaran informasi akan menurun seiring dengan meningkatnya jarak. Hal ini dapat memberikan insentif bagi para pengusaha untuk berlokasi dekat dengan perusahaan lain sehingga dapat menghasilkan aglomerasi.

Mydal dan Pred (dalam Mudrajat Kuncoro, 2012) berpendapat bahawa dampak positif dari kausalitas kumulatif disebut *agglomeration economies* seperti terbentuknya industri baru, penciptaan kesempatan kerja lebih lanjut, peningkatan daya tarik kerja dan modal, peningkatan keterampilan penduduk, pengembangan industri terkait, perluasan jasa-jasa lokal dengan biaya per unit yang lebih rendah, dan tersedianya jasa dan hiburan yang baik. Pada saat aglomerasi di suatu wilayah mampu mencapai skala ekonomis maksimum maka ekspansi setelah titik tersebut akan dapat menimbulkan dampak negatif (*agglomeration diseconomies*) bagi wilayah aglomerasi. Dengan adanya persaingan antar perusahaan dan industri yang terus terjadi, maka lama kelamaan akan meningkatkan harga bahan baku dan faktor produksi sehingga biaya per unit akan mengalami kenaikan yang dapat menyebabkan relokasi aktivitas ekonomi ke daerah lain yang belum mencapai skala produksi maksimum. Munculnya *agglomeration economies* di suatu wilayah akan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut dikarenakan terdapat efisiensi produksi (Hasanah, 2016).

2.1.4 Investasi

2.1.4.1 Pengertian Investasi

Investasi secara umum yaitu suatu kegiatan penanaman modal yang dilakukan oleh pemodal (investor). Dornbusch dan Fischer (2004) menjelaskan investasi adalah permintaan barang dan jasa untuk menciptakan atau menambah kapasitas produksi atau pendapatan di masa datang. Sukirno (2004) menjelaskan definisi investasi sebagai pengeluaran penanam modal atau perusahaan yang dilakukan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Jumlah barang modal terus bertambah kemudian akan menghasilkan barang dan jasa yang lebih banyak di masa depan, selain hal itu juga dilakukan karena penggantian barang modal lama sudah haus dan perlu disepresiasikan. Sedangkan Suparmoko (2000) mendefinisikan investasi sebagai pengeluaran yang ditujukan untuk menambah atau mempertahankan persediaan kapital. Yang termasuk dalam persediaan kapital ini antara lain mesin-mesin, pabrik, dan barang tahan lama lain yang digunakan dalam proses produksi (Suindyah, 2021).

Investasi dilakukan karena melihat ekspektasi mendapat keuntungan yang lebih besar di masa yang akan datang dibanding saat ini. Investasi yang dilakukan penanam modal bukanlah untuk memenuhi kebutuhannya sendiri tetapi lebih karena mencari untung (Sukirno, 2004). Oleh karena itu banyak sedikitnya keuntungan yang akan didapat akan sangat mempengaruhi besarnya investasi yang dilakukan oleh para investor. Selain itu, Sukirno juga menjelaskan masih ada

beberapa faktor lain seperti suku bunga, ramalan mengenai keadaan ekonomi masa depan, kemajuan teknologi, tingkat pendapatan nasional, dan keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan juga mempengaruhi tingkat investasi. Suparmoko (2000) dalam Pengantar Ekonomika Makro menjelaskan bahwa beberapa hal yang mempengaruhi pengeluaran investasi adalah ekspektasi hasil, tingkat bunga, dan tingkat pendapatan nasional. Investasi yang dilakukan diharapkan akan memberikan keuntungan yang lebih besar sehingga tidak sedikit perusahaan yang berinvestasi cukup besar, namun perlu diperhatikan bahwa semakin banyak jumlah investasi akan memberikan tingkat keuntungan yang makin rendah (Suparmoko, 2000). Hal ini dapat terjadi karena secara umum pada awal penggunaan faktor produksi yang digunakan pada proyek-proyek yang dianggap memiliki keuntungan tertinggi, barulah kemudian proyek-proyek yang keuntungannya makin rendah (Pangiuk, 2017).

Besar kecilnya investasi yang dilakukan dapat mempengaruhi kesempatan kerja serta penyerapan tenaga kerja. Dengan terus bertambahnya besaran investasi maka penyediaan lapangan kerja juga akan meningkat, kesempatan kerja bertambah dan penyerapan tenaga kerja juga bertambah, kemudian pendapatan masyarakat akan bertambah sehingga kesejahteraan masyarakat juga tercapai.

2.1.4.2 Teori-Teori Investasi

a. Teori Neo Klasik

Teori Klasik menekankan tentang pentingnya tabungan sebagai sumber investasi. Investasi dilihat sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan serta pembangunan ekonomi. Semakin cepat perkembangan investasi dibangkan laju

pertumbuhan penduduk, maka semakin cepat pula perkembangan volume stok kapital rata-rata per tenaga kerja. Semakin tinggi rasio kapital per tenaga kerja cenderung makin tinggi pula kapasitas produksi per tenaga kerja. Tokoh Neo Klasik, Sollow dan Swan memusatkan perhatiannya pada bagaimana pertumbuhan penduduk, akumulasi kapital, kemajuan teknologi dan *output* saling berinteraksi dalam proses pertumbuhan ekonomi (Arsyad, 2010) (Suindyah, 2021).

b. Teori Harrod-Domar

Harrod-Domar mempertahankan pendapat dari para ahli ekonomi sebelumnya yang dimana ini merupakan gabungan dari pendapat kaum Klasik dan Keynes, beliau menekankan tentang peranan pertumbuhan modal dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi. Teori Harrod-Domar melihat tentang pembentukan modal dianggap sebagai pengeluaran yang akan menambah kemampuan suatu perekonomian untuk menghasilkan barang dan atau jasa, ataupun sebagai pengeluaran yang akan menambah permintaan efektif seluruh masyarakat. Dimana apabila pada suatu masa tertentu dilakukan sejumlah pembentukan modal, maka pada masa berikutnya perekonomian tersebut mempunyai kemampuan untuk menghasilkan barang-barang dan jasa yang lebih besar (Sukirno, 2009) (Suindyah, 2021).

2.1.5 Upah Minimum

2.1.5.1 Pengertian Upah Minimum

Upah minimum memiliki arti sebagai ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai keharusan perusahaan untuk membayar upah sekurang-

kurangnya sama dengan kebutuhan hidup layak kepada pekerja/buruh yang paling rendah tingkatnya yang merupakan perlindungan bagi kelompok pekerja lapisan bawah atas pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja maksimal 1 tahun, agar memperoleh upah serendah-rendahnya sesuai dengan kebutuhan hidup minimum.

Menurut Sony Sumarno, upah minimum yaitu upah yang ditetapkan secara minimum regional, sektor regional, ataupun sub sektoral. Di dalam hal ini upah minimum merupakan upah pokok dan tunjangan. Selain itu, upah minimum juga merupakan upah pokok yang diatur secara minimal baik regional, sektoral maupun sub sektoral. Sementara itu upah minimum menurut Case & Fair (2005: 533) adalah upah yang paling rendah yang diizinkan untuk dibayar oleh perusahaan oleh para pekerjanya. Sedangkan upah minimum berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 7 Tahun 2013 Tentang “Upah Minimum”, Upah Minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh Gubernur sebagai jaring pengaman (Sp & Santosa, 2013).

Pemerintah menetapkan upah minimum didasarkan pada kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas serta pertumbuhan ekonomi. Upah minimum dibagi menjadi:

- a. Upah minimum yang didasarkan pada wilayah provinsi atas kabupaten/kota. Besar upah ini untuk tiap-tiap wilayah provinsi atau kabupaten/kota tidak sama, tergantung pada nilai kebutuhan hidup layak (KHL) di daerah yang bersangkutan. KHL merupakan standar kehidupan

yang harus terpenuhi oleh seorang pekerja untuk dapat hidup layak secara fisik, nonfisik dan sosial.

- b. Upah minimum yang didasarkan pada sektor/sub sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota. Upah minimum sektoral ditetapkan berdasarkan kelompok usaha tertentu contohnya seperti kelompok usaha manufaktur dan nonmanufaktur.

Menurut Menteri Ketenagakerjaan, yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang “Pengupahan”, penetapan upah minimum dilaksanakan menggunakan formula perhitungan upah minimum. Adapun formulanya yaitu $UM_n = UM_t + \{UM_t \times (\text{Inflasi} + \% \Delta PDRB_t)\}$.

Untuk menghindari pemberian upah yang tidak sesuai dengan upah minimum yang telah ditetapkan maka terdapat beberapa langkah yang bisa dilakukan yaitu dengan cara kedua belah pihak melakukan perundingan atau negoisasi. Adapun yang dapat diperoleh dengan cara tersebut adalah pertama, upah mencerminkan kemampuan perusahaan dan kemauan pekerja yaitu perusahaan yang mempunyai kinerja baik akan memberikan kesejahteraan yang baik pula bagi pekerja. Kedua, fungsi upah untuk dorongan motivasi karena pekerja akan memaksimalkan produktivitasnya supaya perusahaan dapat menghasilkan kinerja yang lebih baik. Karena dengan kinerja yang baik maka akan menghasilkan pendapatan yang lebih baik pula.

2.1.5.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Upah Minimum

Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja, dan Transmigrasi No. 07 Tahun 2013, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi upah minimum adalah Kebutuhan

Hidup Layak (KHL) dengan memperhatikan produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi.

a. Produk Domestik Regional (PDB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai tambah bruto keseluruhan barang dan jasa yang tercipta serta dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang dapat timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan faktor-faktor produksi yang memiliki residen atau non-residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui tiga pendekatan yaitu pendekatan produksi, pendapatan serta pengeluaran.

b. Kebutuhan Hidup Layak

Sejak ditetapkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, pemerintah menetapkan standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebagai dasar dalam penetapan upah minimum. Berdasarkan Peraturan menteri ketenagakerjaan No. 17 Tahun 2005, tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian KHL, yang dimaksud dengan KHL yaitu standar kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak baik secara fisik, non fisik, dan sosial untuk kebutuhan satu bulan.

c. Indeks Harga Konsumen

Indeks Harga Konsumen atau IHK merupakan indikator ekonomi yang digunakan untuk mengukur perkembangan harga dari sejumlah barang dan jasa (paket komoditas) yang dibayar oleh konsumen/ rumahtangga, khususnya konsumen di perkotaan. IHK hanya mengukur perubahan harga bukan tentang tingkat harga. Komponen dalam perhitungan IHK yaitu sebagai berikut:

1) Paket Komoditas

Paket komoditas IHK yaitu berisi sejumlah barang dan jasa yang pada umumnya dibeli oleh konsumen/rumah tangga di kota tertentu atau menentukan harga-harga yang paling penting dengan pemberian bobot tertentu.

2) Diagram Timbang dan Nilai Konsumsi

Diagram timbang atau bobot IHK dihitung didasarkan pada proporsi pengeluaran/nilai konsumsi setiap jenis barang dan jasa terhadap total pengeluaran/nilai konsumsi dari hasil survei biaya hidup (SBH).

3) Tahun Dasar

Memilih satu tahun dari tahun basis yang merupakan suatu tolak ukur yang menjadi bandingan tahun-tahun yang lainnya. Dalam menghitung indeksnya, harga barang dan jasa untuk setiap tahun dibagi dengan harga keranjang pada tahun basis, kemudian perbandingan ini dikalikan dengan 100. Maka diperoleh angka hasilnya adalah indeks harga konsumen.

2.1.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan hasil dari penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian yang akan dilakukan penulis mengenai Pengaruh Faktor Aglomerasi Industri, Investasi Sektor Industri dan Upah Minimum terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2021. Penelitian terdahulu bertujuan untuk memperkuat dan membandingkan hasil analisis yang dilakukan.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti, Tahun dan Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Fatihatus Hasanah (2016) Analisis Pengaruh Aglomerasi Industri, Angkatan Kerja dan <i>Human Capital Investment</i> Terhadap PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2014	PDRB dan Aglomerasi Industri	Angkatan Kerja dan <i>Human Capital Investment</i>	Aglomerasi Industri tidak berpengaruh terhadap PDRB sedangkan Angkatan kerja dan <i>Human Capital Investment</i> berpengaruh positif signifikan terhadap PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah	Jurnal Pendidikan dan Ekonomi, Vol. 5, No. 4 (2016) Hal. 283-291 ISSN: 2599-1418
2.	Endri Agustin, dkk (2020) Pengaruh Aglomerasi Industri, Angkatan Kerja, dan Tingkat Upah Pekerja Terhadap PDRB Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2019	PDRB dan Aglomerasi Industri	Angkatan Kerja dan Tingkat Upah Pekerja	Aglomerasi Industri tidak berpengaruh terhadap PDRB sedangkan Angkatan kerja dan Tingkat Upah Pekerja berpengaruh positif signifikan terhadap PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah	DINAMIC: <i>Directory Journal of Economic</i> Vol. 3 No. 1 (2020) Hal. 220-235 ISSN: 2684-7868
3.	Irma Mar'atus Sholihah, dkk (2017) Analisis investasi sektor industri manufaktur, pengaruhnya terhadap PDRB dan penyerapan tenaga kerja di Indonesia	PDRB dan Investasi Sektor Industri manufaktur	Penyerapan tenaga kerja	Investasi industri manufaktur mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap PDRB dan penyerapan tenaga kerja di Indonesia	Jurnal Paradigma Ekonomika Vol. 12, No. 1 (2017) Hal. 11-24 ISSN: 2085-1960
4.	Ambok Pangiuk (2017) Pengaruh Investasi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap PDRB Provinsi Jambi (Studi Tahun 2012-2015)	PDRB dan Investasi	Pengeluaran Pemerintah	Investasi dan Pengeluaran Pemerintah mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap PDRB Provinsi Jambi	<i>Itizam Journal Of Shariah Economic Research</i> , Vol. 1, No. 1 (2017) Hal. 1-20 E-ISSN: 2598-2540
5.	Windy Ayu Astuti, dkk (2017) Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja dan	PDRB dan Investasi	Tenaga Kerja dan Pertumbuhan	Investasi dan Pertumbuhan Penduduk memiliki hubungan negatif dan signifikan	Jurnal Akuntansi & Ekonomika

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pertumbuhan Penduduk Terhadap PDRB di Kabupaten Pelalawan		Penduduk	terhadap PDRB sedangkan Tenaga kerja memiliki hubungan positif dan tidak signifikan terhadap PDRB Kabupaten Pelalawan	, Vol 7, No. 2 (2017) Hal. 140-147 ISSN: 2599-1426
6.	Fahrizal, Zamzami dan Muhammad Safri (2021) Analisis Pengaruh Jumlah Tenaga Kerja, Tingkat Pendidikan dan Investasi Melalui Kesempatan Kerja di Provinsi Jambi	PDRB dan Investasi	Jumlah Tenaga Kerja, Tingkat Pendidikan dan Kesempatan Kerja	Tenaga Kerja, Pendidikan dan Investasi berpengaruh positif signifikan terhadap PDRB di Provinsi Jambi. Tenaga Kerja dan Pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kesempatan kerja sedangkan Investasi dan PDRB tidak berpengaruh terhadap Kesempatan kerja di Provinsi Jambi.	Jurnal Paradigma Ekonomika Vol.16, No.1 (2021) Hal. 167-190 ISSN: 2085-1960
7.	Muhammad Taufik (2014) Pengaruh Investasi Dan Ekspor Terhadap PDRB Serta Penyerapan Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Timur	PDRB dan Investasi	Ekspor dan Penyerapan Tenaga Kerja	Investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB sedangkan Ekspor berpengaruh langsung dan signifikan terhadap PDRB.	Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan, Vol. 7, No. 2 (2014) Hal. 90-101 ISSN: 2301-8968
8.	Ni Kadek Vina Ardiana Dewi dan I Komang Gde Bendesa (2020) Analisis Pengaruh Investasi dan Upah Minimum Kabupaten Terhadap Kesempatan Kerja dan PDRB di Bali	Investasi, Upah Minimum Kabupaten dan PDRB	Kesempatan Kerja	Investasi secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB sedangkan Upah Minimum Kabupaten dan Kesempatan Kerja secara langsung tidak berpengaruh terhadap PDRB di Bali	E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana, Vol. 9, No.3 (2020) Hal. 595-625 ISSN: 2303-0178
9.	Foengsitanojo dan Trisantoso Julianto dan Suparno (2016) Analisis Pengaruh Jumlah Industri Besar	PDRB dan Upah Minimum	Jumlah Industri Besar	Jumlah Industri Besar dan Upah Minimum mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap PDRB di Kota	Jurnal Ekonomi & Bisnis, Vol. 1, No. 2 (2016)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	dan Upah Minimum Terhadap PDRB di Kota Surabaya			Surabaya	Hal 229 – 256 ISSN: 2541-5255
10.	Hari Winarto, Zumaeroh dan Diah Retnowati (2022) Pengaruh <i>Human Capital</i> , Upah Minimum dan Angkatan Kerja terhadap PDRB Sektor Industri Pengolahan di Provinsi Jawa Tengah	PDRB dan Upah Minimum	<i>Human Capital</i> dan Angkatan Kerja	Human Capital dan Upah Minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB sektor industri pengolahan sedangkan angkatan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB sektor industri pengolahan	Ekonomis: <i>Journal of Economics and Business</i> , Vol. 6, No. 1 (2022) Hal. 190-194 ISSN: 2687-8919
11.	Aldi Rifkyanda (2020) Pengaruh Investasi, Belanja Daerah, Tenaga Kerja, dan Aglomerasi Industri Terhadap PDRB di Provinsi Banten Tahun 2012 – 2018	PDRB dan Aglomerasi Industri	Investasi, Belanja Daerah dan Tenaga Kerja	Investasi, Belanja Daerah, Tenaga Kerja, dan Aglomerasi Industri memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB di Kabupaten/Kota Provinsi Banten Tahun 2012 - 2018	Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra (JMAS) Vol. 2, No. 3 (2021) Hal. 153-169 ISSN : 27970086
12.	Melantika Destya Windasari, Suhesti Ningsih dan Yuwita Ariessa Pravasanti (2021) Analisis Pengaruh Aglomerasi Industri, Angkatan Kerja, dan <i>Human Capital Investment</i> terhadap PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2019	PDRB dan Aglomerasi Industri	Angkatan Kerja, dan <i>Human Capital Investment</i>	Aglomerasi industri tidak berpengaruh secara signifikan terhadap PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah sedangkan Angkatan Kerja dan <i>Human Capital Investment</i> berpengaruh secara signifikan terhadap PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah	Jurnal Akuntansi dan Pajak, Vol. 22, No. 01 (2021) Hal. 387-393 ISSN1412-629X
13.	Muhammad Ilyas (2018) Analisis Pengaruh Aglomerasi Industri, Angkatan Kerja dan <i>Human Capital Investment</i> terhadap	PDRB dan Aglomerasi Industri	Angkatan Kerja dan <i>Human Capital Investment</i>	Aglomerasi industri memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap PDRB JABODETABEK sedangkan Angkatan Kerja dan <i>Human</i>	Ekonomis: <i>Journal of Economics and Business</i> , Vol. 6, No. 2 (2022) Hal. 434-438

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	PDRB Wilayah JABODETABEK			<i>Capital Investment</i> memiliki pengaruh positif signifikan terhadap PDRB JABODETABEK	ISSN: 2597- 8829
14.	Yois Nelsari Malau, Lilyana Loren, Catherine, Selvia Hendrawan (2020) Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja dan Ekspor Terhadap PDRB	PDRB dan Investasi	Tenaga Kerja dan Ekspor	Investasi dan Ekspor tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap PDRB di Provinsi Sumatera Utara sedangkan Tenaga Kerja berpengaruh terhadap PDRB	Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi), Vol.4 No.3 (2020) Hal. 1711- 1724
15.	Vela Norlita (2018) Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, dan Infrastruktur Terhadap PDRB di Pulau Jawa Tahun 2006-2015	PDRB dan Investasi	Tenaga Kerja, dan Infrastruk tur	Investasi dan Tenaga Kerja berpengaruh signifikan terhadap PDRB di Pulau Jawa sedangkan Infrastruktur tidak berpengaruh dan tidak sigifikan terhadap PDRB di Pulau Jawa	Jurnal Pendidikan dan Ekonomi, Vol. 7 No. 2, (2018) Hal. 194-203 ISSN: 2259- 1605

2.2 Kerangka Pemikiran

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator keberhasilan suatu negara dalam rangka mensejahterakan kehidupan masyarakatnya. Melalui teori pertumbuhan ekonomi daerah yaitu suatu kondisi terjadinya perkembangan PDRB potensial yang menunjukkan adanya pertumbuhan output perkapita serta meningkatkan standar hidup masyarakat. Untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah terdapat beberapa faktor pendukungnya. Dalam penelitian ini dibahas faktor-faktor yang mempengaruhi PDRB (Y) yaitu faktor aglomerasi industri (X1), investasi sektor industri (X2) dan upah minimum (X3). Faktor-faktor tersebut akan diteliti secara simultan dan parsial yang dapat diukur dengan alat analisis regresi untuk mendapatkan tingkat signifikansinya.

2.2.1 Hubungan Aglomerasi Industri dan PDRB

Aglomerasi industri dapat menyebabkan adanya persaingan industri yang selanjutnya akan menyebabkan naiknya harga bahan baku dan faktor produksi, serta mengakibatkan biaya per unit mulai naik yang berdampak pada relokasi aktivitas ekonomi ke daerah lain yang belum mencapai skala produksi maksimum sehingga akan tercipta efisiensi produksi dan kemudian mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Meningkatnya produktivitas suatu perusahaan tentu akan berdampak pada PDRB di wilayah tersebut. Selain itu dengan adanya aglomerasi industri juga akan menciptakan suatu pola konsumsi yang berbeda antar daerah, sehingga perkembangan industri yang ada pada daerah tersebut akan mempengaruhi daerah lainnya. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Aldi Rifkyanda (2020) yang menemukan bahwa terdapat hubungan positif antara aglomerasi industri dan PDRB. Artinya setiap terjadinya peningkatan angka aglomerasi industri, maka nilai PDRB akan meningkat.

2.2.2 Hubungan Investasi Sektor Industri dan PDRB

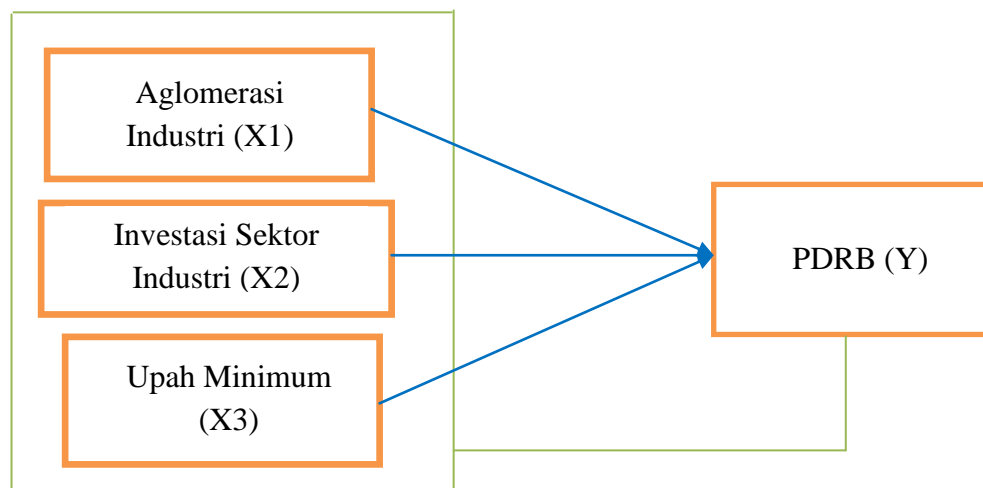
Hampir semua para ahli ekonomi menekankan arti pentingnya investasi sebagai penentu utama pada pertumbuhan ekonomi. Investasi atau permodalan merupakan persediaan faktor produksi baik yang secara fisik dapat dihasilkan maupun direproduksi. Jika persediaan modal tersebut dapat meningkat dalam jangka waktu tertentu maka bisa dikatakan bahwa terjadi pembentukan modal pada waktu tersebut. Akumulasi modal inilah yang terus kekurangan di negara-negara berkembang, sedangkan modal ini memegang peranan yang cukup penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi.

Investasi dalam peralatan modal tidak hanya meningkatkan produksi akan tetapi juga kesempatan kerja. Dengan terbukanya kesempatan kerja yang lebih luas, maka tingkat pendapatan masyarakat juga akan bertambah dan berbagai macam kebutuhan rakyat terpenuhi. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa setiap kenaikan laju investasi maka akan meningkatkan pendapatan nasional. Oleh karena itu, investasi merupakan jalan keluar utama dari berbagai masalah yang dihadapi negara terbelakang dan merupakan kunci utama untuk menuju pertumbuhan ekonomi. Investasi memiliki hubungan yang sangat erat dengan pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan karena investasi merupakan salah satu faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Dalam teori Harrod-Domar menjelaskan bahwa dengan adanya investasi merupakan kunci utama dalam pertumbuhan ekonomi. Untuk meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, dalam setiap periodenya maka dibutuhkan adanya tambahan investasi sebagai stok modal. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Safri (2021) yang menemukan bahwa terdapat hubungan positif antara investasi dan PDRB. Artinya setiap terjadinya peningkatan nilai investasi, maka nilai PDRB akan meningkat.

2.2.3 Hubungan Upah Minimum dan PDRB

Upah minimum merupakan suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau para pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja di dalam lingkungan usaha atau kerjanya (Julianto & Suparno, 2016). Setiap daerah di Indonesia memiliki tingkat pemenuhan kebutuhan yang berbeda-beda oleh karena itu dibuatlah aturan di setiap wilayah dengan menggunakan Upah

Minimum Regional/Upah Minimum Kabupaten. Upah yang diterima oleh para tenaga kerja yang bekerja di suatu perusahaan menjadi penghasilan yang dapat digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan sehari-hari dalam hal konsumsi rumah tangga yang dapat memberi dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut (Winarto et al., 2022). Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Hari Winarto (2022) yang menemukan bahwa terdapat hubungan positif antara upah minimum dan PDRB. Artinya setiap terjadinya peningkatan angka upah minimum, maka nilai PDRB akan meningkat.



Gambar 3.1 Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Berdasarkan kajian teori yang telah dilakukan dan pertimbangan pada penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini, maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diduga secara parsial aglomerasi industri, investasi sektor industri dan upah minimum berpengaruh positif terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2021.

2. Diduga aglomerasi industri, investasi sektor industri dan upah minimum berpengaruh secara bersama-sama terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2021.